

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada Era Digitalis 5.0 Pengaruh sektor swasta tumbuh di banyak negara berkembang sebagai akibat dari perdagangan bebas dan sistem perdagangan bebas. Munculnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sangat penting bagi perluasan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru.

Ada banyak sumber yang mendefinisikan usaha kecil, menengah, dan besar (UMKM). Fakta ini tidak asing lagi mengingat banyaknya pihak yang berkepentingan dengan UMKM sehingga masing-masing memberikan definisi UMKM sesuai dengan kriteria yang ditentukan sendiri.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah pemilik bisnis yang fokus pada berbagai usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Menurut Undang-Undang 1995 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang Kebijakan Ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi UMKM perlu dibudibayakan Karena memiliki "kedudukan", "peran", dan "potensi untuk menciptakan struktur ekonomi nasional yang lebih seimbang, tumbuh, dan stabil, usaha kecil dan menengah (UKM) harus diakui sebagai bagian integral dari ekonomi yang lebih besar. Selanjutnya, pengertian UMKM yang ditetapkan UU No.9 Tahun 1999 karena perkembangan yang semakin pesat, definisi UMKM direvisi dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2008, Pasal 1 Tentang Usaha Kecil dan Menengah. Definisi baru ini dapat ditemukan secara lengkap di bawah ini.: Pengertian Usaha Mikro yaitu : 1. Usaha Mikro adalah usaha perseorangan atau persekutuan yang memenuhi kriteria UMKM yang telah diatur didalam UU. 2. Usaha kecil yaitu usaha yang dijalankan adalah milik perorangan atau bukan bagian dari anak atau cabang perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini. 3. Usaha Menengah yaitu usaha yang dijalankan milik perorangan dan bukan anak atau cabang perusahaan dengan jumlah

kekayaan hasil penjualan tahunan sebagaimana ditentukan dalam UU ini (Rahmini, 2008)

Masalah ekonomi dan sosial yang kerap terjadi di berbagai negara khususnya Indonesia, seperti tingkat kemiskinan yang tinggi, pengangguran, dan pendapatan ekonomi yang tidak merata. Maka dengan demikian, pengembangan UMKM diharapkan berdampak positif terhadap masalah-masalah tersebut.

Ketika krisis melanda Indonesia, usaha kecil dan menengah sangat berperan lebih baik dari pada perusahaan besar. Karena usaha kecil tidak memerlukan modal yang besar. Sedangkan perusahaan besar terus-menerus melakukan transaksi dengan mata uang asing sehingga memicu krisis keuangan ketika terjadinya fluktuasi nilai tukar.

UMKM sangat penting bagi pembangunan ekonomi masyarakat. Menurut data BPS dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2021), sebanyak 64,2 juta orang bekerja di usaha kecil dan besar pada tahun 2021, dengan 97,22% di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Data menunjukkan UMKM memberikan kontribusi terhadap penyediaan tenaga kerja dan membantu PBD sebesar 61,07%. (KP UKM, 2019).

Berdasarkan data tersebut, kondisi UMKM Indonesia semakin membaik. UMKM yang dikelola dan dikembangkan dengan baik dapat mendorong perekonomian Indonesia. Besar kecilnya tenaga kerja UMKM menentukan potensinya untuk tumbuh dan berkontribusi lebih besar bagi negara. UMKM selamat dari krisis ekonomi global 1997-1998 dan 2008. Di saat banyak perusahaan besar gulung tikar dan mengambil keputusan PHK, UMKM mampu mempekerjakan kembali karyawan yang dipecat. Kontribusi UMKM serupa dengan Indonesia di beberapa negara. Rata-rata, UMKM di berbagai negara yang cukup maju mencapai hampir 90% dari semua bisnis, mempekerjakan 2/3 dari seluruh pekerja di negara tersebut (Timo & Mechthild, 2006).

UMKM menghadapi salah satu masalah paling umum dalam bisnisnya yaitu penulisan laporan keuangan. UMKM membutuhkan laporan keuangan

untuk setiap kegiatannya yang dapat dijadikan sebagai kaca perbandingan untuk kegiatan usaha selama satu periode akuntansi.

Untuk melengkapi kebutuhan data UMKM, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) periode tahun 2009 membuat standar yang diambil dari IFRS dan SMEs yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Akan tetapi untuk implementasi terkait standar ini belum maksimal dikalangan pelaku usaha. Hal ini memiliki kendala karena minimnya pemahaman serta pengetahuan dalam penerapan laporan keuangan yang mengikuti standar tersebut. Pada tanggal 24 Oktober 2016 DSAK IAI mengesahkan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil dan menengah (SAK EMKM) yang bertujuan membantu pelaku usaha dalam penyajian laporan keuangan yang berisi konsep yang cukup mudah dan lebih sederhana dari SAK ETAP (Kusuma & Indra, 2018).

Dalam undang-undang UMKM tahun 2008 (UU No.20) terdapat pedoman penyusunan dan pelaksanaan SAK EMKM. standar ini dibuat agar dapat memudahkan UMKM dalam menerapkan standar akuntansi pada laporan keuangannya.

SAK EMKM diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan pada UMKM dan memberikan akses layanan perbankan yang lebih luas. Standar ini terdiri dari tiga bagian: laporan posisi keuangan, laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan memberikan informasi mengenai keuangan perusahaan yang dapat digunakan oleh khalayak luas untuk membuat keputusan ekonomi. Laporan keuangan mengungkapkan atas tanggung jawab manajemen terkait sumber daya yang telah diamanahkan (Neneng Salmiah, 2015)

Dengan menyediakan laporan keuangan dapat membantu lembaga keuangan untuk melihat kelayakan UMKM tersebut. Sehingga UMKM tersebut dapat mengajukan pinjaman kepada Lembaga perbankan. Namun UMKM Pabrik Tempe Rumahan Desa Pekan Tolan masih sulit untuk

mengajukan pendanaan dari Lembaga perbankan karena laporan keuangannya yang belum sesuai dengan SAK EMKM yang berlaku.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terbesar di Desa Pekan Tolan salah satunya adalah Pabrik Tempe Rumahan milik Ibu Roslina yang berlokasi di Desa Pekan Tolan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten labuhan Batu Selatan. Usaha ini menjual tempe rumahan dalam berbagai bentuk dan harga.

Alasan peneliti memilih Pabrik Tempe Rumahan menjadikan tempat penelitian atau objek penelitian karena Pabrik tempe Rumahan merupakan usaha dagang yang cukup maju di wilayah Desa Pekan Tolan sejak tahun 2018, usaha ini bergerak dibidang penjualan tempe buatan sendiri dengan berbagai bentuk serta harga yang cukup murah.

Alasan lain peneliti menjadikan Pabrik Tempe Rumahan ini sebagai objek penelitian karena berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha yaitu Ibu Roslina (2022) yang menyatakan bahwa Pabrik Tempe Rumahan ini telah melakukan Pencatatan Pemasukan dan pengeluaran, beban gaji, beban listrik, dan utang. Hal ini tidak sesuai dengan teori bahwa menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, SAK EMKM minimal memiliki laporan keuangan UMKM yang meliputi laporan posisi keuangan, laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. (I.A.I, 2017). Mengingat keterbatasan pemahaman pemilik usaha, mengenai SAK EMKM sehingga laporan keuangannya belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).

Hasil penelitian Siti Ady Afni (2019), Komang Ariadana (2017), dan Rika Yunita (2018) menyatakan bahwa masih banyak nya UMKM yang belum menerapkan SAK EMKM pada laporan keuangannya karena minimnya pemahaman pelaku usaha terhadap standar ini sehingga melakukan pencatatan yang sederhana.

Jika ini terus berlanjut, manajemen keuangan yang buruk dapat menyebabkan keputusan buruk yang merugikan usaha tersebut. Agar penyajian laporan keuangan Pabrik Tempe Rumahan ini berkualitas maka

harus melakukan pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).

Sesuai dengan hal di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Standart Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah (SAK EMKM) Pada Laporan Keuangan Pabrik Tempe Rumahan (UMKM Desa Pekan Tolan Kabupaten Labuhan batu selatan)”**

### **B. Identifikasi Masalah**

Sesuai uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan terkait masalah yang ada pada penelitian ini sebagai berikut:

1. UMKM pabrik tempe rumahan melakukan pencatatan laporan keuangan yang belum sesuai dengan SAK EMKM.
2. Minimnya pemahaman serta pengetahuan bagian keuangan terkait pencatatan yang sesuai dengan SAK EMKM
3. Pencatatan laporan keuangan menggunakan pencatatan yang sederhana yaitu jurnal kas masuk dan kas keluar

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah penelitian dapat diuraikan sebagai berikut.:

1. Bagaimana pencatatan laporan keuangan yang dilakukan oleh UMKM Pabrik Tempe Rumahan?
2. Apakah dalam penyajian laporan keuangan UMKM Pabrik Tempe Rumahan sudah sesuai dengan SAK EMKM?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pencatatan laporan keuangan yang disajikan oleh UMKM pabrik tempe rumahan.

2. Mengetahui penyajian laporan keuangan UMKM pabrik tempe rumahan telah sesuai dengan SAK EMKM.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian penulis, manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan di bidang akuntansi mengenai penerapan SAK EMKM pada laporan keuangan suatu usaha.
  - b. Penelitian ini harus menginformasikan praktik pelaporan keuangan SAK EMKM.
  - c. Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya terutama di bidang akuntansi dalam penerapan SAK EMKM pada laporan keuangan UMKM.
2. Manfaat praktis
  - a. Bagi penulis, penelitian ini merupakan pengaplikasian ilmu yang terdapat di perkuliahan serta sebagai sarana untuk memperluas pemahaman tentang laporan keuangan UMKM sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM).
  - b. Bagi UMKM, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan sumber informasi mengenai akuntansi yang sesuai dengan SAK EMKM. Ini akan membantu dalam memahami pentingnya pelaporan keuangan dan membantu dalam mengambil keputusan pada periode selanjutnya.